

BAB II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Perkembangan Organisasi Kepolisian

Berakhirnya masa Republik Indonesia Serikat (RIS) mempengaruhi keberadaan organisasi Kepolisian yang disesuaikan dengan konstitusi negara. Peleburan jawatan-jawatan Kepolisian RIS dan jawatan Kepolisian negara bagian menjadi satu menghasilkan organisasi Kepolisian untuk seluruh Indonesia. Namanya pun berubah dari Jawatan Kepolisian Indonesia menjadi Jawatan Kepolisian Negara¹. Kantor pusat tetap berada pada satu gedung dengan Kementerian Dalam Negeri di Jalan Sagara No. 7 Jakarta.² Sehingga pada pusat terdapat Jawatan Kepolisian Negara, yang kemudian tersusun pada tingkat bawahnya adalah Polisi Propinsi, Polisi Karesidenan, Polisi Kabupaten, Polisi Wilayah, Polisi Sub-Wilayah, dan Pos Polisi.

Pada Kantor Jawatan Kepolisian Negara terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Sekretariat
2. Bagian Urusan Pegawai
3. Bagian Keuangan

¹ Jawatan Kepolisian Negara merupakan istilah nama untuk menggantikan Jawatan Kepolisian Indonesia. Jawatan Kepolisian Negara mulai digunakan ketika masa Republik Indonesia Serikat karena nama ini dirasa sangat cocok daripada nama sebelumnya. Jawatan Kepolisian Negara tidak pula disebut dengan Jawatan Kepolisian RIS , karena penggunaan sebutan RIS menyatakan aliran federal ketika masa RIS, sedangkan pemakaian Indonesia tidak sesuai dengan susunan. Sehingga pada waktu itu dipilihkan sebutan Jawatan Kepolisian Negara.

²Memet Tanumidjaja. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. 1971, hlm. 66.

4. Bagian Perlengkapan
5. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat
6. Bagian Reserse Kriminil (sekarang kriminal)
7. Bagian Koordinasi Inspeksi Mobile Brigade³

Pada Kantor Polisi Propinsi terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Umum termasuk urusan pegawai, urusan keuangan, dan urusan perlengkapan
2. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat
3. Bagian Reserse Kriminil
4. Bagian Koordinator Inspeksi Mobile Brigade

Kantor Polisi Karesidenan, Kantor Polisi Kabupaten, dan Kantor Polisi Wilayah mempunyai struktur organisasi yang seragam. Pada tiap-tiap kantor terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Umum termasuk urusan pegawai, tata usaha, keuangan perlengkapan, logistik dan personil
2. Bagian Reserse Kriminil
3. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat

Kantor Polisi Sub-Wilayah membawahi beberapa Pos Polisi yang ada disetiap kecamatan. Struktur organisasi ini mengalami perubahan pada tahun 1951 dengan keluarnya Surat Keutusan Menteri Dalam Negeri No.Pol.:42/2/28/Um tanggal 13

³Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm. 214.

Maret 1951. Surat keputusan tersebut disusul oleh Order Kepala Kepolisian Negara (KKN) No.23/II/1951 tanggal 13 Mei tentang Staf Jawatan Kepolisian Negara.⁴ Order KKN ini sebenarnya merupakan usaha untuk melengkapi struktur sebelumnya, dan disesuaikan dengan berdirinya propinsi-propinsi baru diberbagai daerah. Struktur Organisasi baru tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Kantor Jawatan Kepolisian Negara terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Sekretariat dipimpin oleh AKBP M. Oudang
2. Bagian Urusan Kepegawaian dipimpin oleh Kombes Pol. R. Djen. Moh. Soerjo Pranoto
3. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kom. Pol. I. R. S. Soewondo Pranoto
4. Bagian Perlengkapan dipimpin oleh R. Soetjipto (Pegawai tinggi diperbantukan pada Kepolisian)
5. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat dipimpin oleh AKBP R. Moh. Oemar Ghatab
6. Bagian Reserse Kriminil dipimpin oleh Kobes Pol. R. Soeprapto
7. Bagian Koordinator Inspeksi Mobile Brigade dipimpin oleh AKBP M. Yasin
8. Bagian Inspeksi Daerah dipimpin oleh Kombes Pol. R. Oemar Sahid
9. Bagian Polisi Perairan dipimpin oleh Kom. Pol. I. R. P. Soedarsono
10. Bagian Inspeksi Pendidikan dipimpin oleh Kombes Pol. R. Soebarkah, berkedudukan di Sukabumi.⁵⁶

⁴*Ibid*, hlm. 215.

⁵*Ibid*, hlm. 216

Jumlah Kantor Polisi Propinsi diseluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan pembagian administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

1. Kantor Polisi Propinsi Jawa Barat di Bandung
2. Kantor Polisi Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kantor Polisi Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kantor Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kantor Polisi Propinsi Sumatra Tengah di Bukittinggi
6. Kantor Polisi Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kantor Polisi Propinsi Sulawesi di Makasar
8. Kantor Polisi Propinsi Kalimantan di Banjarmasin
9. Kantor Polisi Propinsi Sunda Kecil di Singaraja
10. Kantor Polisi Propinsi Maluku di Ambon

Pada Kantor Polisi Propinsi Terdapat bagian–bagian sebagai berikut.

1. Bagian Umum, termasuk urusan pegawai, urusan keuangan dan urusan perlengkapan
2. Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat
3. Bagian Reserse Kriminil
4. Bagian Koordinator Inspeksi Mobile Brigade

Pada Kantor Polisi Karesidenan terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Umum, termasuk urusan pegawai, tata usaha, keuangan, perlengkapan, logistik dan personil

⁶ *Ibid.*

2. Bagian Reserse Kriminil
3. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat

Pada Kantor Polisi Kabupaten terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Umum
2. Bagian Reserse Kriminil
3. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Perlengkapan

Pada Kantor Polisi Wilayah terdapat bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Umum
2. Bagian Reserse Kriminil
3. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Perlengkapan

Untuk kedua kalinya pada tahun 1953 didakan lagi reorganisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan Order Kepala Kepolisian Negara tanggal 25 Juli 1953 No.16/III/1953 Staf Kepolisian Negara dilengkapi dengan bagian-bagian sebagai berikut.

1. Kepala Biro Perancang
2. Sekretaris Umum
3. Penasehat
4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

5. Direktur Sekolah Polisi Negara
6. Kepala Polisi Jakarta Raya dan sekitarnya⁷

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala Kepolisian Negara dibantu oleh Staf Harian yang terdiri dari Kepala Biro Perancang dan Sekretaris Umum. Tugas Kepala Biro Perancang adalah merencanakan dengan membentuk peraturan-peraturan/instruksi-instruksi tentang perundang-undangan serta mengawasinya.⁸ Reorganisasi dilanjutkan dengan melengkapi Staf Kepolisian Negara dengan bagian-bagian antara lain:

1. Bagian Sekretariat
2. Bagian Urusan Pegawai
3. Dinas Pegawas Aliran Masyarakat
4. Dinas Reserse Kriminil
5. Nagian Keuangan
6. Bagian Perlengkapan
7. Inspeksi Mobile Brigade
8. Polisi Perairan
9. Inspeksi Pendidikan
10. Inspeksi Daerah
11. Biro Organisasi

⁷Memet Tanumidjaja. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, op.cit. hlm. 70.

⁸Direktorat Personil Markas Besar Kepolisian Negara R.I. *Biografi Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo*. Jakarta:Markas Besar Kepolisian Negara R.I. 1987, hlm. 31.

12. Sekretaris Umum

13. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)⁹

B. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebelum Demokrasi Terpimpin Dan Lahirnya Tri Brata

Sesuai dengan tradisi yang tumbuh setelah masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Kepolisian Negara diikutsertakan dalam operasi-operasi militer untuk menumpas peristiwa-peristiwa yang mengancam keamanan negara, khususnya kesatuan-kesatuan Mobile Brigade yang pada waktu itu telah terbentuk. Tugas-tugas yang dihadapkan Kepolisian pada waktu itu antara lain masalah penyelundupan antara Indonesia dengan semenanjung Malaya dan Filipina, masalah kejahatan-kejahatan internasional seperti obat bius, dan pemalsuan mata uang.

Peresmian Tri Brata pada tanggal 1 Juli 1955 yang bertepatan dengan hari Kepolisian merupakan hal penting bagi sejarah Kepolisian Negara. Tri Brata merupakan pedoman penting dalam Kepolisian. Sebagaimana diketahui, perumusan Tri Brata adalah sebagai berikut:

1. Polisi itu rastrasewakottama : abdi utama dari nusa dang bangsa
2. Polisi itu nagara-janottama: warga negara utama dari pada negara
3. Polisi itu Jana-anucasanadharma: wajib menjaga ketertiban pribadi daripada watak.¹⁰

⁹Awaloedin Djamin. *op.cit*, hlm. 214.

¹⁰Memet Tanumidjaja, *op.cit*, hlm. 89.

Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian berisikan dasar cara pelaksanaan tugas Polisi yang kokoh kuat, karena pedoman hidup itu ditimbulkan dari kepribadian polisi sendiri, yang timbul dari kesadaran pribadi.

C. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebelum Demokrasi Terpimpin

1. Peran Kepolisian dalam gerakan-gerakan operasi militer terhadap siswa-siswi kolonialis Belanda

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Kepolisian Negara dihadapkan pada gejala-gejala meningkatnya kejahatan didaerah-daerah yang semakin meluas dan meliputi segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan militer. Partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan bahkan dalam tubuh lembaga pemerintahan berlomba-lomba merebutkan kedudukan dan lain-lain. Akibatnya disintegrasi terjadi menjalar dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat-akibat yang terjadi antara lain gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta.¹¹

Pada tanggal 23 Januari 1950, terdapat suatu pasukan yang bermama APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah pimpinan seorang anggota tentara Belanda yang juga mendapat julukan algojo karena telah membunuh ribuan orang laki-laki, perempuan dan anak-anak di Sulawesi Selatan menyerbu kota Bandung dan berhasil menduduki kota itu selama satu

¹¹*Ibid*, hlm. 96.

hari.¹² Mereka melakukan penembakan terhadap TNI dan akibatnya terdapat 79 anggota TNI yang gugur, diantaranya Letkol Lembong. Dengan adanya penyerbuan dari APRA tersebut, maka Kepala Jawatan Kepolisian negara mengirimkan pasukannya terutama pasukan Mobile Brigade Jawa Timur dan Yogyakarta yang saat itu dalam tugas di Jakarta. Dengan menggunakan pesawat terbang militer, mereka dikirim ke Bandung untuk menumpas penyerbuan APRA tersebut. Dengan melakukan razia yang intensif, pasukan APRA dapat dituntaskan dan kota Bandung dapat diamankan kembali. Pasukan APRA yang dapat meloloskan diri bermaksud menguasai ibukota. Namun karena kewaspadaan dari alat-alat kelengkapan negara seperti Kepolisian, usaha APRA tersebut dapat digagalkan.

Di Makasar, pasukan-pasukan bekas KNIL yang baru saja masuk APRIS di bawah pimpinan kapten Andi Aziz, menghalang-halangi gerakan unitarisme di Indonesia Timur. Mereka menolak datangnya pasukan APRIS TNI ke Makasar dan menuntut supaya pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja lah yang ditempatkan disana selaku alat negara.¹³

Pada tanggal 5 April 1950 Andi Aziz menawan Staf Territorium Indonesia Timur termasuk pejabat panglimanya Achmad Junus Mokoginta. Pada tanggal 13 April 1950 Andi Aziz dinyatakan sebagai pemberontak dan gerakan operasi

¹²Dahana. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2012, hlm. 367.

¹³Memet Tanumidjaja, *op.cit*, hlm. 97.

militer segera dilakukan dibawah Kolonel A.E. Kawilarang dimana ikut serta kesatuan-kesatuan Kepolisian dan Mobile Brigade Jawa Timur yang dikirim ke Sulawesi Selatan dalam rangka pembentukan Mobile Brigade di Sulawesi. Pada tangga 8 Agustus 1950 gerakan Andi Aziz dapat diselesaikan dan ditumpaskan.

Pada tanggal 25 April 1950 Gerakan Republik Maluku Selatan memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatandi bawah pimpinan Soumokil yang lepas dari pada Negara Republik Indonesia Timur dan RIS. Setelah usaha-usaha untuk menyelesaikan hal tersebut secara damai mengalami kegagalan, maka dilancarkanlah operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kaliwarang.¹⁴ Dalam operasi tersebut Kepala Kepolisian Negara mengikutsertakan kesatuan-kesatuan Kepolisian dari Kompi Mobile Brigade Maluku dan Kompi-kompi tempur yang dikirim dari induk kesatuannya yaitu dari Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

2. Peran Kepolisian dalam Gerakan-gerakan dan Operasi Militer terhadap DI/TII

Gerombolan pasukan DI/TII di Jawa Tengah muncul setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua dimana Amir Fatah kembali memasuki daerah pendudukan Belanda di Tegal dan Brebes dengan pasukan Hisbullahnya yang kemudian membentuk pemerintahan Islam dengan cara membentuk organisasi Islam yang diberi nama Majelis Islam (MI).¹⁵ Amir Fatah tidak

¹⁴Ibid, hlm. 98.

¹⁵Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 247.

mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebaliknya Amir Fatah mengakui berdirinya Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1948 di Jawa Barat di bawah pimpinan S.M. Kartosuwiryo.

Pasukan Mobile Brigade Banyumas di bawah pimpinan Komisaris Polisi R.M. Bambang Soeprapto memasuki daerah Tegal dan Brebes yang juga kemudian disusul pasukan Sub Wehrkreise Komando Sektor (SKWK) dari Batalyon III/3 di bawah pimpinan Mayor Wongsoatmojo yang diikuti oleh instansi-instansi sipil.¹⁶ Upaya-upaya perdamaian di wilayah tersebut dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang penting. Dalam upaya tersebut diadakanlah rapat yang dihadiri oleh Bupati Brebes Agus Mitpah, Komandan SWKS III Mayor Wongsoatmojo, Komandan MBK Banyumas Komisaris Polisi R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo, Wakil Komandan MBK Banyumas PIP, II Dikin Kartowijono, Komandan KODM Brebes Kapten Abdul Djalil, Amir Fatah dari Majelis Islam Indonesia

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa semua unsur bekerja sama dalam menanggulangi serangan dari Belanda. Amir Fatah ditunjuk sebagai koordinator pasukan Hisbullah di Tegal dan Brebes karena sudah dikenal oleh masyarakat. Pasukan Hisbullah sendiri berada dibawah komando dari SWKS III.

Kemudian datanglah seorang utusan dari Negara Islam Indonesia bernama Kamran Tjakrabuana pada Maret 1949 ke Jawa Tengah dan

¹⁶Memet Tanumidjaja, *op.cit*, hlm. 99.

mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh DI/TII di Jawa Tengah, khususnya dengan Amir Fatah¹⁷. Dalam pertemuan itu Kamran mengharapkan agar Amir Fatah dan Majelis Islamnya segera mewujudkan gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan setempat dan menentang Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian oleh NII Amir Fatah diangkat sebagai Jenderal Mayor. Akibatnya Amir Fatah menyerahkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya kepada Komandan SWKS III. Sejak saat itulah dimulailah gerakan DI/TII. Amir Fatah melakukan pelucutan senjata terhadap SWKS III dan melakukan penculikan terhadap anggota-anggota militer. Berita yang paling mengejutkan adalah penculikan terhadap MBK Banyumas Bambang Soeprapto. Amis Fatah semakin kuat dengan pembunuhan-pembunuhan terhadap rakyat yang bukan beragama Islam atau rakyat yang tidak menyetujui adanya DI.

Guna menumpas kekuatan DI/TII yang semakin kuat, maka dilakukanlah operasi bersama dengan kekuatan 3 kompi yang tediri dari kompi Djenal (SWKS IV), Kompi Prawoto (SWKS III), Dan Kompi Mobile Brigade dibawah pimpinan PIP. Dikin Kartowirjono.¹⁸ Operasi ini dipimpin oleh Kapten Prawoto dari SWKS III. Operasi ini dipusatkan ke daerah-daerah yang dijadikan tempat pemasaran kekuatan DI/TII di Tegal, Brebes, Kuningan dan daerah Cilacap. Dengan adanya aoperasi gabungan tersebut, kekuatan DI/TII di Jawa tengah semakin melemah dan kedudukan mereka pun terjepit.

¹⁷Ibid.

¹⁸Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 248.

Sisa-sisa gerombolan PKI-Madiun setelah selesainya Agresi Militer Belanda yang ke II, menghimpun kekuatannya dengan cara melakukan pengacauan di Jawa Tengah dengan pusatnya di Gunung Merapi dan Merbabu. Pengacauan tersebut dipimpin oleh Suradi Bledeg.¹⁹ Aksi ini terjadi pada tahun 1951. Dalam penumpasan gerombolan pengacau ini, Kepolisian mengikutsertakan anggota-anggotanya dengan dibantu oleh TNI melakukan operasi penangkapan terhadap gerombolan tersebut antara lain di Surowono, lereng gunung Merapi dan Merbabu.

Gerombolan tersebut juga sering melakukan pengacauan di daerah Boyolali, maka anggota Kepolisian memperkuat kedudukannya di desa Jaluren, Kemusu, Nguden, Selondono dan Ampel.²⁰ Kepolisian juga membentuk pasukan yang *stootploog* yang anggotanya terdiri dari Dinas Pengawas Keselamatan Negara (DPKS), Reserse Kriminil dan Tugas Umum yang ditugaskan ke daerah Merbabu-Merapi Complex (MMC) dengan berpakaian preman untuk menyelundup ke sarang MMC dan menyamar sebagai rakyatnya.²¹ Maka kemudian anggota Kepolisian dengan TNI melakukan operasi penumpasan terhadap gerombolan tersebut, sehingga anggota gerombolan tersebut dan pemimpinnya dapat ditumpaskan.

¹⁹Memet Tanumidjaja., *op.cit*, hlm. 101.

²⁰*Ibid*, hlm. 102.

²¹Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 260.

Pada tahun 1952 terjadi pemberontakan Batalyon 426 di daerah Klaten Jawa Tengah yang mengacaukan Kota Klaten.²² Dalam menumpas pemberontakan tersebut, pihak TNI dan Kepolisian melakukan operasi gabungan dengan menerjunkan Mobile Brigadenya. Dengan adanya operasi gabungan tersebut maka pasukan Batalyon 426 dapat dipukul mundur menuju Klaten Selatan. Ketika pasukan Batalyon 426 sampai di Delanggu, terjadilah pertempuran sengit dengan Kepolisian yang mengakibatkan seorang anggota Polisi gugur, yaitu agen Polisi II Sudomo. Brigadir Polisi Kanti anggota Kepolisian Mobile Brigade Surakarta yang berada di Boyolali diculik dan dibunuh oleh gerombolan Batalyon 426. Pihak Kepolisian kemudian melakukan operasi ke desa-desa yang dijadikan markas gerombolan Batalyon 426 sampai akhirnya mereka meninggalkan Boyolali. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian, maka wilayah Boyolali dapat dipulihkan kembali.

Setelah itu terdengar kabar bahwa sisa pasukan Batalyon 426 dalam pelarinya dari Kudus menuju ke Barat. Maka pasukan *slootpoog* yang dipimpin oleh PIP II Wirjawan dikerahkan dengan kekuatan 1 Seksi dan diperintahkan mengadakan pencegatan di Sukoharjo.²³ Karena adanya tekanan yang sangat hebat dari pihak angkatan bersenjata, akhirnya sisa-sisa gerombolan Batalyon 426 tersebut melarikan diri ke arah Barat yaitu ke daerah Jawa Barat dan daerah

²²*Ibid.*

²³Memet Tanumidjaja, *op.cit*, hlm. 103.

Brebes dan Tegal yang merupakan daerah DI/TII untuk menggabungkan diri dengan DI disana.

3. Peran Kepolisian dalam operasi penumpasan PRRI/Permesta

Gerakan separatisme daerah telah membentuk Pemerintahan Revvolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Sjafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.²⁴ Dalam upaya menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah mengarahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menumpas pemberontakan tersebut. Operasi tersebut dinamakan operasi TEGAS²⁵ untuk merebut kembali Riau Daratan terutama Pekanbaru. Bersama dengan kesatuan-kesatuan operasi TEGAS, Kepolisian RI mengirim tim yang dipimpin oleh Komisaris Polisi I Soetjipto Danoekoesoemo dengan tugas mengkonsolidasi dan menyusun kembali Kepolisian setempat pada saat itu dalam keadaan tidak terorganisasi tanpa pimpinan akibat pengaruh kaum pemberontak. Pada fase tempur, Mobile Brigade Jawa Tengah ditugaskan dibawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Utoro ke Riau. Kemudian disusul Batalyon dari Mobile Brigade Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat untuk membantu dalam operasi tersebut.

²⁴*Ibid*, hlm. 109

²⁵TEGAS merupakan operasi gabungan yang bertujuan merebut kembali Riau daratan Terutama Pekanbaru. TEGAS terdiri dari pasukan TNI dan satu batalyon Mobile Brigade dari Jawa Tengah dibawah pimpinan Komisaris Polisi I Soetjipto Danoekoesoemo dan Ajun Komisaris Polisi Boedi Joewono Gagak Pranolo.

Selain operasi TEGAS, terdapat operasi SAPTA MARGA²⁶ di Sumatera Utara. Dalam operasi ini dikerahkan TNI dan Mobile Brigade dari Kalimantan dan Jawa Barat untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Utara. Operasi ini kemudian menjalar hingga Sumatera Barat. Deputy Kepala Staff Angkatan Darat Brigadir Jendral Djatikusumo, dengan kesatuaanya antara lain terdiri dari dari kesatuan Brigade Mobil yang dipimpin oleh Komisaris Polisi II M. Kadran dan Ajun Komisaris Polisi Soerojo mengadakan operasi penembusan (*penetration*) dari Medan melalui Sumatera Timur, Tapanuli Selatan, dan berhasil memasuki Sumatera Tengah.²⁷ Dalam pertempuran ini akhirnya sampai di Bukittinggi dan bertemu dengan kesatuan-kesatuan Operasi 17 Agustus. Dalam operasi 17 Agustus ini telah diikutsertakan pleton Ranger dari Kompi 5994 yang ditugaskan di daerah Sumatera Tengah bagian selatan (Bengkulu dan Muko-muko) karena daerah ini sejak tahun 1956 sudah dikuasai PRRI. Daerah ini bisa direbut kembali setelah dilakukan operasi selama 4 bulan.

Untuk menumpas Permesta di daerah Palu Sulawesi Tengah, pada tanggal 8 Maret 1958 1 kompi Mobile Brigade dibawah pimpinan Aiptu M. Sjukur melakukan serangan terhadap Permesta.²⁸ Dalam serangan tersebut, Permesta

²⁶ SAPTA MARGA Merupakan operasi gabungan militer yang terdiri dari pasukan Batalyon TNI dan kesatuan Mobile Brigade Kalimantan, Jawa Barat dan Batalyon Pelopor Korps Mobile Brigade. Operasi ini bertujuan merebut dan mengamankan daerah yang telah dikuasai PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Tengah serta Sumatera Timur.

²⁷ Memet Tanumidjaja, *op.cit*, hlm. 111.

²⁸ *Ibid*, hlm. 112

berhasil diceraikan beraikan dan kota Palu dapat diamankan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1958 Aiptu Subur menerima surat dari Kapten TNI Supangat melalui pesawat AURI jenis Catalina yang isinya menyatakan agar kesatuan-kesatuan Kepolisian di Palu mempersiapkan diri untuk menyerang Permesta di Donggala. Maka dari itu kepolisian Palu dan Mobile Brigade bersama-sama mengambil alih Donggala dari Permesta.

Selama pemberontakan Permesta, Mobile Brigade Maluku kompak dan tidak ada penyelewengan. Untuk memelihara keseimbangan kekuatan di kota Ambon mereka menekan sisa-sisa pemberontak RMS di Seram dan turut aktif bersama Angkatan Darat menumpas Permesta. Kekutan Mobile Brigade di Maluku sejumlah enam kompi yaitu Ki 5121, 5148, 5154, 5157, 5487 dan kompi combat²⁹ dikerahkan secara maksimal dengan konsolidasi melalui beberapa kompi induk pasukan yang didatangkan sebagai pasukan bantuan.

²⁹*Ibid*, hlm. 113.